

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(Studi Kasus : Desa Lampuara Kecamatan  
Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)**

**Hasbia Novianti<sup>1)</sup>, Sri Wahyuni Mustafa<sup>2)</sup>, Muhammad Ikbal<sup>3)</sup>**

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Univeritas Muhammadiyah Palopo

Jl. Jendral Sudirman Km. 3 Binturu Kota Palopo

E-mail : [hasbianovianti05@gmail.com](mailto:hasbianovianti05@gmail.com)

**ABSTRAK**

Partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa dalam pembangunan desa. Yakni berupa partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang cukup/sedang mencapai 50% (lima puluh persen). Faktor penghambat masyarakat Desa Lampuara tidak ikut berpartisipasi yakni disebabkan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta masyarakat bersikap apatis dan merasa telah terwakilkan dengan kehadiran Kepala Dusun.

(Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, RKPDDes )

**ABSTRACT**

*Community participation is expected to increase efforts to improve conditions and living standards of rural communities in village development. Namely in the form of village community participation by developing independently. This study aims to determine how community participation in the planning process of village government work plans (RKPDDes). This research uses descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. From the results of the study, it was concluded that in general, community participation in participating in Musrenbang was sufficient/moderate to reach 50% (fifty percent). The inhibiting factor for the people of Lampuara Village not to participate is because they are more concerned with*

*personal interests and the community is apathetic and feels that they have been represented by the presence of Kepala dusun*

*(Keywords: Community Participation, Planning, RKPDes)*

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan desa. Dalam melaksanakan tujuan pembangunan, maka segala potensi yang ada harus dikembangkan, seperti potensi manusia berupa penduduk yang harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan tercapainya pelaksanaan program pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Desa Lampuara merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian menjadi seorang petani. Dalam hal ini perlu tindak lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa

Lampuara. Sesuai dengan isi yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah melibatkan masyarakat luas.

berdasarkan pernyataan tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, dimana peran serta masyarakat sangat penting untuk tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, kesadaran masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan, terutama dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa, sehingga nantinya partisipasi mereka akan terlihat.

Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya di mana dalam penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat terdapat berbagai pendapat. Beberapa penelitian memiliki perbedaan hasil penelitian seperti Khriisaputro (2017:150), hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa Mlopoharjo sudah dilaksanakan dengan baik pada tingkat RT, dusun, dan desa. Tetapi partisipasi masyarakat hanya sampai pada

tahap mengusulkan, mereka tidak ikut menentukan prioritas pembangunan artinya masyarakat hanya mengikuti proses mengeluarkan ide atau gagasan tidak mengikuti hingga tahap akhir yaitu pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Sifat ketergantungan adalah hal kurang menguntungkan pada masyarakat. Mereka tidak akan berkembang dikarenakan tidak adanya partisipasi dalam mengeluarkan pendapat terutama dalam proses perencanaan RKP Desa padahal ini merupakan hal yang utama demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Wibowo, dkk. (2014:51) partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan di desa Mojo masih dipengaruhi oleh berbagai hal seperti masalah ketenagakerjaan, ketimpangan ekonomi, dan masih bergantung masyarakat dengan pemerintah, pemerintah desa, dan pemerintah pusat.

Keterlibatan dalam proses perencanaan RKP Desa adalah hal yang krusial demi tepat sasaran program kerja desa yang dirancang. Katili, dkk. (2018:6) dari Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli**

Hetifah berpendapat, "Partisipasi sebagai komitmen sukarela oleh orang-orang tanpa tekanan dan kepentingan eksternal bangsa."

pembangunan desa kurang/rendah. Masyarakat desa kurang melibatkan diri dalam penyusunan dan pembahasan RPJM dan RKP, baik secara langsung melalui Musrenbang Desa maupun tidak langsung melalui perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat.

Dari uraian penelitian di atas memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan partisipasi Masyarakat Desa di mana masih terdapat kesenjangan penelitian. Jadi penelitian tentang ini Penting untuk dilakukan dengan mengamati keterlibatan masyarakat yang ada di Desa Lampuara apakah masyarakat desa lampuara berpartisipasi dalam prosesnya yakni perencanaan rencana kerja pemerintah desa demi maksimalnya kegiatan pembangunan di Desa Lampuara, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: **"Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi Kasus : Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu)"**.

Menurut Histiraludin "Partisipasi itu seperti alat untuk mendapatkan partisipasi untuk dimaknai sebagai keterlibatan." Masyarakat terlibat aktif sebagai media dalam seluruh proses kegiatan Tumbuhnya kohesi antara

masyarakat, masyarakat dan pemerintah Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dengan program-program seperti: Istilah "partisipasi" telah menjadi kata kunci untuk semua program selama ini. Pengembangan masyarakat seolah-olah harus menjadi "model baru" yang seharusnya Terlampir pada semua pengembangan kebijakan dan proposal proyek.

### **Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Menurut Theresia (2014:196-199) partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian "pengikutsertaan/peran serta" atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama (Sumaryadi: 2010:46). Selanjutnya Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2011:58), antara lain sebagai berikut. "(a) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. (b) partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. (c) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. (d) partisipasi adalah

pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampakdampak sosial. (e) partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. (f) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka."

### **Pembangunan Desa**

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2013:526) pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatannya yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan).

Pemerintah di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan. Program-program pembangunan pedesaan tersebut antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah:

- a. pembangunan pertanian (agricultural development)
- b. industrialisasi pedesaan (rural industrialization)
- c. pembangunan masyarakat desa terpadu (integrated rural development)

d. strategi pusat pertumbuhan (growth centre strategy)

### **Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan? Bilamana akan dilakukan? Dan siapa yang akan melakukan? Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan ingin dirumuskan.

### **Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes)**

Proses penyusunan rencana dimulai dengan tahap penyusunan RPJMDes dan RKPDDes. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa untuk jangka waktu 6 Tahun. RPJMDes adalah program pemerintah yang mengatur tentang rancangan dan penyusunan pembangunan desa yang disusun oleh kepala desa. Irwan Muhadi (2013:8)
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 Tahun.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

Menurut Yulianti (2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. Pengetahuan dan keahlian.
2. Pekerjaan masyarakat.
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf.
4. Jenis kelamin..
5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu

Menurut Sunarti, faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan

mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, lingkup objek yang ditetapkan peneliti sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana partisipasi masyarakat Desa Lampuara dalam proses perencanaan rencana kerja pemerintah desa, sesuai dengan objek maka penelitian dilakukan di Desa Lampuara dan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2022.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode kualitatif memperlakukan partisipan sebagai subjek bukan objek sehingga partisipan menganggap dirinya berharga karena informasi dari mereka sangat bermanfaat sedangkan Sumber data akan diambil dari informan, gambar, dokumen dan transkrip wawancara. Berikut uraiannya :

#### **1. Informan**

Informan dalam penelitian ini yakni berjumlah 4 orang meliputi Wakil Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Leppangang, dan Satu orang perwakilan warga Desa Lampuara.

#### **2. Dokumen**

Dalam penelitian ini, dokumen yang di gunakan adalah data-data yakni berupa profil desa dan struktur organisasi desa di Desa Lampuara.

#### **3. Gambar**

Gambar dalam penelitian ini adalah dokumentasi pada saat melakukan observasi dan wawancara terhadap partisipan pada pelaksanaan Musrembang Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

#### **4. Transkrip Wawancara**

Transkrip wawancara atau menyalin wawancara adalah catatan tertulis dari wawancara lisan yang telah selesai dilakukan. Menyalin wawancara sendiri merupakan kegiatan mendokumentasikan percakapan antara dua orang atau lebih.

### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam

mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

### 1. Wawancara

penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara untuk proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Pada pelaksanaan wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab, yakni bertatap muka antara penanya dengan si penjawab.

### 2. Observasi

Observasi yang dimaksud yaitu penulis akan turun observasi langsung dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat untuk keperluan tersebut. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa Lampuara.

### 3. Dokumentasi

Penulis menggunakan dokumentasi karena mengumpulkan data meneliti dengan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan sebagai tanda bukti bahwa penulis

telah melakukan penelitian secara langsung.

## **Teknik Analisis Data**

Creswell (2013) menjabarkan lebih detail dalam analisis dalam langkah analisis data berikut ini:

1. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya.
2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang-orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut (horisnoalisasi data) dan perlakukan setiap pernyataan setara, serta kembangkan rincian tersebut dengan tidak melakukan pengulangan (nonrepetitive) atau tumpang tindih (nonoverlapping).
3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit makna (meaning units), peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks (textural description) tentang pengalamannya, termasuk contoh-contohnya secara seksama.
4. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif (imaginative variation) atau deskripsi struktural (structural

description), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif divergen (divergent perspectives), mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala (phenomenon) dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami.

5. Peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan esensi (essence) pengalamannya.
6. Dari deskripsi tekstural dan struktural individu, berdasarkan pengalaman tiap partisipan, peneliti membuat composite description.

## **PEMBAHASAN**

### **Rencana Kerja Pemerintah Desa**

Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 Tahun. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan

Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan yang nantinya akan menjadi dasar Pemerintah Desa dalam penetapan APB Desa. Dalam menyusun RKP Desa, Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat Desa. Di desa Lampuara sendiri telah dilakukan kegiatan musyawarah desa dalam menentukan RKPDes untuk anggaran tahun 2023 dalam melakukan penyusunan tersebut ditemukan bahwa ternyata di Desa Lampuara lebih cepat dari perkiraan waktu yang ditentukan. seperti pernyataan yang dikemukakan Sekretaris Desa Lampuara Bapak Abd. Rahman:

*“Bulan dua kemarin kami telah melakukan kegiatan musyawarah desa untuk tahun anggran 2023”*

Dengan adanya penjabaran rencana pembangunan menengah desa yakni rencana kerja perintah desa, pembangunan desa lebih terperinci mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Namun tidak serta-merta semua usulan dari masyarakat akan disetujui atau menjadi usulan dari desa itu sendiri karena beberapa pertimbangan. Seperti pernyataan dari bapak Hakim selaku warga masyarakat desa Lampuara berikut pernyataannya:

*Ada yang sesuai....seperti pembuatan bendungan masyarakat di sini merasakan manfaatnya dulu petani sawah hanya 2 kali panen dalam jangka waktu 2 tahun namun sejak*



adanya bendungan sekarang bisa panen padi hingga 5 kali. Tapi ada juga yang menjadi keresahan masyarakat seperti aspal di desa ini yang mengalami kerusakan parah namun belum diperbaiki.

Penyataan tersebut menimbulkan pertanyaan kenapa permasalahan besar seperti pembangunan infrastruktur jalan masih tersendak padahal kebutuhan ini merupakan hal yang urgensi. Ibu Halimah selaku wakil ketua BPD menjawab pertanyaan tersebut:

*Tidak lain permasalahan ini kendalanya dari anggaran dan tidak semua Rencana pembangunan di terima oleh pemerintah daerah.*

**Tabel 5.1**

**Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa  
Desa Lampuara Kecamatan Ponrang  
Selatan Kabupaten Luwu  
Tahun Anggaran 2021**

<b>N o</b>	<b>Usulan Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Volum e</b>
1	Pembangunan Saluran Pembuang	Masyarakat Desa	300 M
2	Pembangunan Talud (Kebunnya Opu Esse)	Masyarakat Desa	1500 M
3	Pembangunan Plad	Masyarakat Desa	8 Unit

	Dueker		
4	Pembangunan Drainase	Masyarakat Desa	3 Km
5	Pembangunan Jitut	Masyarakat Desa	3 Km
6	Pengkrikilan Jalan	Masyarakat Desa	1500 M
7	Pengerasan Jalan Tani	Masyarakat Desa	1500 M
8	Pembangunan Drainase	Masyarakat Desa	1500 M
9	Pembangunan Rabat Baton	Masyarakat Desa	500 M
10	Pagar Mesjid	Masyarakat Desa	1 Paket
11	Pembangunan Jitut	Masyarakat Desa	1000 M
12	Pembangunan Tarabatan Perahu	Masyarakat Desa	1 Paket
13	Pembangunan Talud	Masyarakat Desa	1 Km

*Sumber Data : Hasil Musrembangdes Desa Lampuara Tahun 2020*

Tabel 5.1 menjabarkan bahwa RKPDes pada tahun anggaran 2021 yakni telah dianggarkan pengaspalan jalan sekitar 1,5 KM yang bertempat di Dusun Tanete, Desa Lampuara hal ini telah menjawab kegelisahan warga masyarakat Desa Lampuara bahwa tidak semua program kerja akan langsung teranggarkan di

RKPDes melainkan bertahap dan terkait keputusan pemerintah daerah. Dan diketahui bahwa Dusun Tanete ini adalah dusun terakhir yang di mekarkan dan belum pernah di aspal sedangkan ke tiga dusun yakni Dusun Ujung, Dusun Leppangang dan Dusun Lampuara sudah pernah diaspal namun mengalami kerusakan tentunya yang didahulukan yang belum pernah diaspal.

Sejalan pernyataan Ibu Halimah Bapak ABD. Rahman selaku Sekretaris Desa Lampuara mengatakan:

*Benar nak masalah utamanya yah anggaran ini, kita tidak bisa bergerak tanpa anggaran.*

Tepat sasaran suatu program pembangunan adalah suatu hal patut disyukuri warga masyarakat Desa Lampuara namun tidak semua program kerja yang diusulkan akan terealisasi diakibatkan Keputusan Musrenbangdes tersebut masih melalui proses Musrenbang pada level yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Usulan masyarakat desa masih akan dikaji oleh tim dari Kabupaten berdasarkan skala prioritas, sehingga penilaian kegiatan akan dilakukan secara integrative meliputi kebutuhan, kelayakan maupun anggaran yang tersedia. Hingga tahap ini, masyarakat Desa Lampuara hanya bisa pasrah dan berharap agar usulan tersebut bisa disetujui.

Adapun tahapan dalam penyusunan

RKP Desa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tahap 1 (Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa)
2. Tahap 2 ( Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa)
3. Tahap 3 (Pencermatan Pagu Indikatif Desa Dan Penyelarasan Program/Keg. Masuk ke Desa)
4. Tahap 4 ( Pencermatan Ulang RPJM Desa)
5. Tahap 5 ( Penyusunan Rancangan RKP Desa)
6. Tahap 6 (Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
7. Tahap 7 (Penetapan RKP Desa)
8. Tahap 8 (Perubahan RKP Desa)
9. Tahap 9 (Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa)

Demikian sekilas terkait dengan tahapan dan sistematika penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya yang ada di Desa.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang**

Menurut Theresia (2014:196-199) partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Istilah partisipasi

banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama (Sumaryadi: 2010:46). Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan desa dengan adanya keikutsertaan masyarakat adanya hubungan yang terbangun antara masyarakat dan aparat desa sehingga adanya transparansi dalam proses pembangunan dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai keberpihakan program pembangunan yang dirancangkan.

Selanjutnya Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2011:58), antara lain sebagai berikut. “(a) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. (b) partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. (c) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. (d) partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. (e)

partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. (f) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.” Kesadaran masyarakat sendiri adalah kunci masyarakat aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam kegiatan musrenbang inilah RKPDes di rancangkan dengan melibatkan warga masyarakat.

Peneliti memulai penelusuran pada Sekretaris Desa Lampuara, dimana yang menjadi informan adalah Bapak ABD. Rahman selaku Sekretaris Desa dalam menggali informasi mengenai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musrenbang ditemukan bahwa ada yang ikut serta namun tidak semua dari undangan yang disebar.

Hasil wawancara dengan Bapak ABD. Rahman mengatakan :

*Tentunya mereka siap mendukung dan ikut serta dalam pelaksanaan perencanaan RKP Desa inikan juga untuk kebaikan mereka sendiri. Disamping itu untuk meminta saran dan pandangan terkait dengan*

*pembangunan kita ke depan tentang apa saja yang harus kita bangun.*

Hal ini senada dengan dengan pernyataan Bapak Adriyan selaku Kadus Leppang .beliau mengatakan:

*Iya dek, masyarakat Desa Lampuara ikut berpartisipasi dilihat dalam kegiatan Musrembang mereka hadir.*

Senada dengan pernyataan Bapak ABD. Rahman dan Bapak Adriyan Ibu Halinah selaku Wakil Ketua BPD mengatakan:

*Terkait dengan pertanyaan itu masyarakat ikut berpartisipasi apalagi ini demi kebaikan mereka juga, namun melihat presesnsi kehadiran masyarakat dari undangan yang disebar sekitar 100 orang hanya 50% yang hadir yakni 50 orang.*

Berdasarkan hasil observasi, ternyata masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang namun masih kurang yakni hanya setengahnya saja dari undangan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini, masyarakat wajib dilibatkan karena kegiatan Musrembang sendiri merupakan wadah dalam menentukan program kerja apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat yakni tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk program kerja dalam jangka waktu 1 Tahun. Sebagaimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa Pemerintah Desa

menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Hal tersebut meyakini bahwa keikutsertaan masyarakat sangatlah penting demi memenuhi kebutuhan warga masyarakat desa itu sendiri.

Dalam konteks ini, Masyarakat memiliki hak untuk dikonsultasikan dalam konteks ini Menentukan jenis pembangunan yang akan berlangsung di daerah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi pelaku pembangunan dan dan dipersiapkan untuk merumuskan masalah mereka hadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, dan laksanakan untuk menikmati dan menyimpan produk yang dihasilkan.

### **Faktor Penghambat Masyarakat Tidak Ikut Berpartisipasi**

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Mohtar dan Chollin (2011:41), di samping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial-ekonomis juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam

berpartisipasi. Selain itu, sejumlah faktor lingkungan juga mempengaruhi hasil tingkat partisipasi seperti apakah pemilihan itu berlangsung pada satu saat krisis, sejauh mana kebijakan pemerintah itu relevan bagi individu, luasnya kesempatan individu dapat mempergunakan informasi yang relevan, sejauh mana individu tunduk pada kelompok penekan (golongan berpengaruh) dalam pemberian suara, dan sejauh mana individu mengalami tekanan yang berlawanan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Hakim bahwa yang menjadi faktor penghambat sebagian besar masyarakat Desa Lempuara tidak berpartisipasi yakni disebabkan mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mereka menganggap Kepala Dusun telah mewakili aspirasi mereka. Berikut pernyataannya:

*Salah satu penyebab masyarakat tidak ikut kegiatan Musrenbang yakni disebabkan karena tidak ada kemauan dari si warga tersebut sekalipun ada sosialisasinya. Di samping itu warga desa Lempuara sebagian besar bermata pencaharian petani hal tersebut mengakibatkan mereka lebih memilih ke kebun, sawah atau ,mengurus rumput laut mereka.*

Faktor yang menjadi pendukung masyarakat dalam berpartisipasi dalam

suatu program adalah timbulnya rasa partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dalam perealisasi sikap tersebut ditunjang oleh beberapa faktor pendukung yakni kemauan, kemampuan dan kesempatan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan di mana jika ada kemauan tentu didukung dengan kemampuan dalam hal ini yakni kemampuan menyuarakan pendapat dalam pemenuhan pembangunan desa bagi masyarakat itu sendiri, di samping itu perlunya kesempatan yang diberikan kepada warga masyarakat. Dengan adanya kegiatan musrenbang warga masyarakat Desa Lempuara telah diberikan wadah untuk mengeluarkan pendapatnya.

Menurut Yulianti (2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu

proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;

3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Menurut Sunarti, faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Di samping partisipasi masyarakat yang merupakan hal yang sangat penting tentunya peran pemerintah juga komponen utama dalam tercapainya suatu pembangunan ibarat kata pemerintah desa adalah jembatan dalam perwujudan program yang direncanakan. **Simpulan**  
Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara, adapun kesimpulan yang saya dapatkan adalah :

1. Secara umum partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang di Desa Lampuara adalah sedang dengan karakteristik, partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan pendapat usulan/saran juga sedang dilihat dari kehadiran yakni hanya 50% saja. Hal ini dikarenakan Kurangnya sosialisasi akan dilaksanakannya kegiatan musrenbang oleh pemerintah desa sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan diadakannya kegiatan musrenbang dan lebih

mengutamakan kepentingan pribadi..

2. Faktor penghambat masyarakat tidak mengikuti kegiatan musrenbangdes Lampuara diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat untuk meningkatkan hasil pembangunan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musrenbang sehingga pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan musrenbang sangat kurang. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi seperti mereka pergi bekerja dari pada mengikuti kegiatan musrenbang dikarenakan tidak ada imbalan atau hadiah apabila masyarakat mengikuti kegiatan musrenbang, harus ada iming-iming hadiah baru masyarakat pergi berpartisipasi dalam musrenbang. dan masyarakat menganggap kehadiran kepala dusun, rt dan rw sudah mewakili kepentingan mereka, serta masyarakat berpendapat bahwa pemerintah desa lebih tau tentang pembangunan desa yang mereka butuhkan.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Pada proses perencanaan pembangunan lebih baik apabila masyarakat di Desa Lampuara tetap dilibatkan sampai tahapan akhir penetapan perencanaan agar masyarakat mengetahui dan mengerti aspirasi yang mereka sampaikan dapat terkoordinasi oleh pemerintah daerah atau tidak karena tentunya tidak semua usulan di setuju pemerintah daerah.
2. Disarankan kepada pemerintah desa memberikan pengertian pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang demi meningkatkan keefektifan hasil pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Meryy. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). 4(1): 1–23. <https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Publika/Article/View/13950>. 20 Februari 2022 (23:22) .
- Hakim, Lukmanul. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. 2(2): 43–53. <https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Politikomindonesiana/Article/View/963>. 20 Februari 2022 (23:20)

- Kanaha, Ibnu. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara). *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3(2): 76. 21 Februari 2022 (02:05).
- Katili, Eka Wulandari, Masjey Siliya Pangkey Dengo, Salmin. 2018. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Una Kecamatan taliabu Utara Kabupaten Taliabu (1): 1–8. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/Viewfile/21235/20944>. 21 Februari 2022 (02:15)
- Khrissaputro, Stefanus, Ferry. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Mlopoharjo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. *Uns Institutional Repository* 110265: 110493. 21. Februari 2022 (02:09)
- Moleong. 2013. "Sumber Data Penelitian Kualitatif." <http://andreassmr.blogspot.com/2021/>. 22 Maret 2022 (22:15).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa. 2014. *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53(9): 1689–99.
- Putri, Sarah, Nuramalia. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung). : 1–32. [https://123dok.Com/Document/Qvpw-ekgq-Partisipasi-Masyarakat-Pembangunan-Temanggung-Diponegoro-University-Institutional-Repository.Html?Utm\\_Source=Searc\\_h\\_V3](https://123dok.Com/Document/Qvpw-ekgq-Partisipasi-Masyarakat-Pembangunan-Temanggung-Diponegoro-University-Institutional-Repository.Html?Utm_Source=Searc_h_V3). 20 Februari 2022 (21.25)
- Rupini, Luh. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. 2018 10 (1): 46–60.
- Soendari, Tjutju. 2001. Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif. Dapat
- Soendari, Tjutju. 2017. "Teknik analisis Data" <https://text-id.123dok.com/document/nzwo2xevy-instrumen-penelitian-uji-keabsahan-data.html>. 24 Februari 2022 (13:23)
- Sumaryadi. 2010. Pengertian Partisipasi. :46. <https://eprints.uny.ac.id/7720/3/bab%202%20-%20%2007110241010.pdf>. 19 Maret 2022 (20:38)
- Sugiono. 2015. "Pengertian Triangulasi." : 22–27. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4014/4/BABIII.pdf>. 0
- \_\_\_\_\_. 2012. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Alfabeta. Bandung.
- Theresia, Aprillia. 2014. Pengertian Partisipasi. 196-199. [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. : 303.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Bpkp*. [Http://www.Bpkp.Go.Id/Sakd/Konten/333/Versi-2.1.Bpkp](http://www.Bpkp.Go.Id/Sakd/Konten/333/Versi-2.1.Bpkp).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wibowo, Toni, Ari, Joko Pramono & Jana Harjanta. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mojo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. (26): 80–85.
- Yanti, Asri, Arsidik Asuru & Andi Syahrir. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah). 12: 429–



40.

*[Http://Ojs.Uho.Ac.Id/Index.Php/Selami/Article/View/10832.](http://Ojs.Uho.Ac.Id/Index.Php/Selami/Article/View/10832)*